

# Seminar Nasional

“Pengembangan Daerah Perbatasan Sebagai Sistem Pembangunan Indonesia Dalam  
Menjaga Keutuhan Teritorial Negara”



## **MASA DEPAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA**

---

Mahendra Putra Kurnia  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
25 Mei 2015

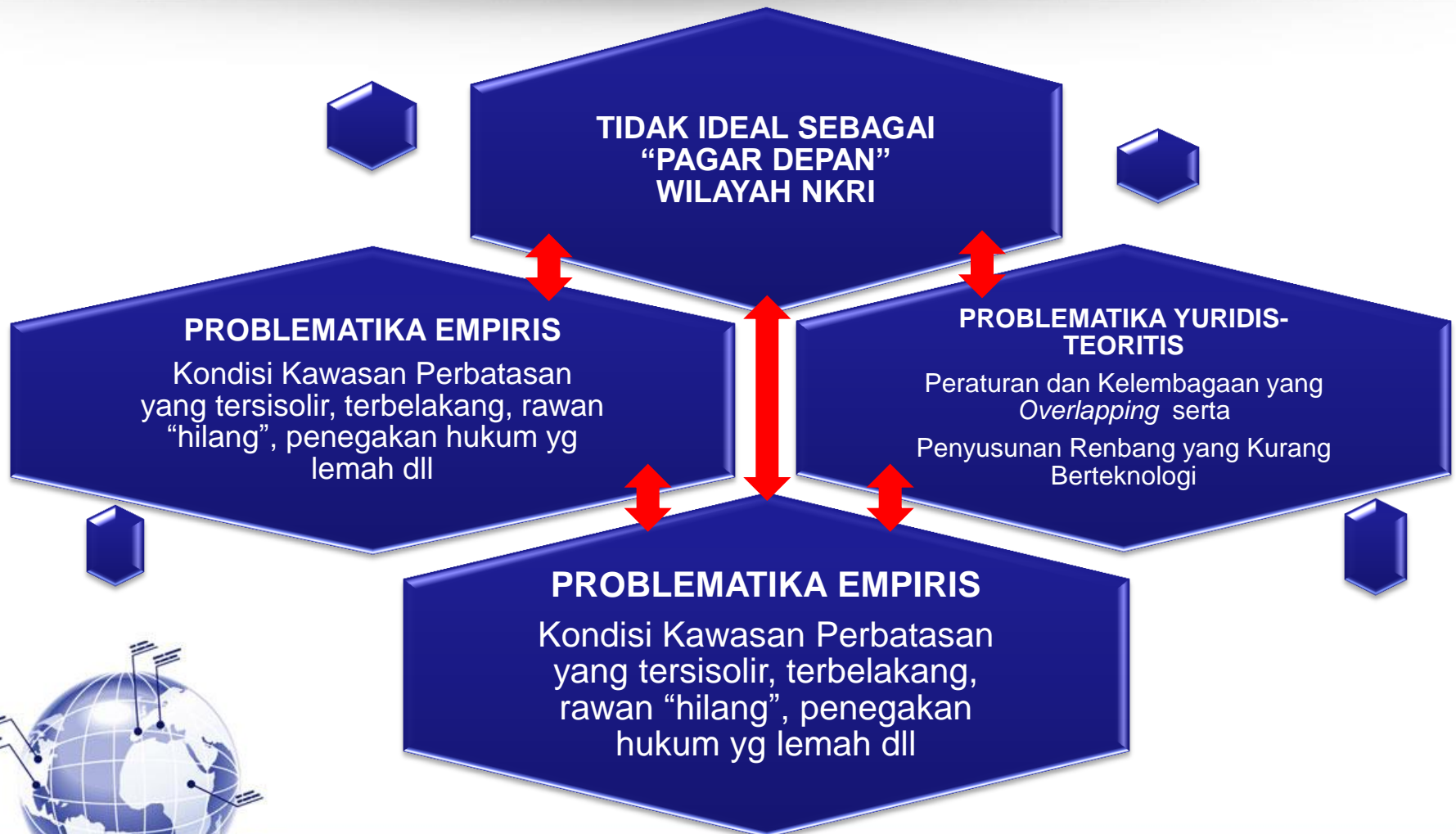


# MASA DEPAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

kawasan perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional), dengan banyaknya negara yang berbatasan langsung, hal ini bisa menimbulkan konflik perbatasan seperti pada kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan dan sengketa Blok Ambalat serta beberapa permasalahan lain di wilayah perbatasan



# Problematika Kawasan Perbatasan RI



# JANJI PEMERINTAH

## JANJI PEMERINTAH RI

- mewujudkan Indonesia yang **bersatu** dan **berdaulat** serta **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan **seluruh tumpah darah Indonesia** sebagaimana tercantum dalam Secara khusus terkait kawasan perbatasan RI, adalah tanggung jawab dari Pemerintah RI untuk menepati janjinya memajukan dan mempercepat pembangunan dan menjadikan kawasan perbatasan RI layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah RI sebagaimana tercantum dalam UU SPPN, UU RPJPN dan Nawa Cita.

**BELUM SEPENUHNYA  
TEREALISASI**



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Paradigma dan Kebijakan

1. Konsisten terhadap perubahan orientasi pembangunan dari *land base oriented* ke *archipelagic base oriented* (berbasis negara kepulauan) yang berlandaskan pada hakikat wawasan nusantara yaitu keutuhan nusantara.
2. Konsisten terhadap Nawa Cita 1 dan 3
3. Memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang disinergikan dengan program pembangunan nasional dan daerah



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Paradigma dan Kebijakan

4. Konsep pemberdayaan masyarakat perbatasan (termasuk Komunitas Adat Terpencil – KAT) dari segala aspek kehidupan
5. Meningkatkan rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat Indonesia



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Paradigma dan Kebijakan

5. Adanya kebijakan utk peningkatan sarana-prasarana pengaman perbatasan, seperti alat tempur, perbaikan fasilitas pos perbatasan, perbaikan patok/batas wilayah dll.
6. Adanya kebijakan utk meningkatkan kesejahteraan aparat-aparat penjaga perbatasan, sehingga rasa “minder” terhadap fasilitas yang dimiliki aparat penjaga perbatasan negara tetangga dapat dikikis.



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Hukum dan Kelembagaan

1. Harmonisasi Hukum (ide [one regulation](#))
2. Efektifitas dan efisiensi kerja dari lembaga-lembaga khusus perbatasan yang telah ada (ide one body)
3. Meningkatkan kerjasama di berbagai bidang (ekonomi, politik, keamanan dsb) dengan negara-negara tetangga





# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Implementasi

1. *Quick Line of communication and coordination* yang mantap antara pos-pos perbatasan dengan pemerintah pusat dan daerah
2. Meningkatkan penegakan hukum di masing-masing negara terutama di daerah perbatasan



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Implementasi

3. Adanya pengaturan yang rapi antara pejabat-pejabat perbatasan (TNI, Polri dan Pemda) antara kedua negara yang berbatasan, terutama di bidang pertukaran *intelligence* dan informasi, saling memahami persyaratan dan prosedur lintas batas masing-masing dan kalau perlu kerjasama *joint patrol*, *hot pursuit* dan *joint exercises*
4. Maksimalisasi Teknologi dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan RI



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Implementasi

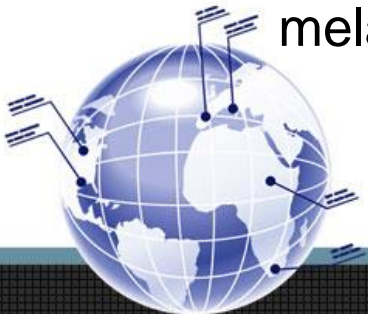
5. Perlunya pemahaman semua pihak (Pemerintah, TNI, Polri, lembaga yudikatif –hakim&jaksa- dan lembaga legislatif serta masyarakat) terhadap berbagai ketentuan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan, baik di darat, laut dan udara.



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Implementasi

6. Khusus untuk penindakan pelanggaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
  - a. Harus adanya profesionalitas dan kejujuran dari aparat penjaga perbatasan, karena disinyalir terdapat unsur permainan, kesengajaan atau unsur pidana lain yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan
  - b. Penindakan tanpa pandang bulu, artinya siapa pun yang melanggar harus ditindak



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Implementasi

c. Soliditas antara aparat keamanan (TNI&Polri) dengan masyarakat dan juga dengan aparat perbatasan negara tetangga harus tetap terjaga, kasus baku tembak antar aparat tidak boleh terulang lagi.

d. Aparat harus peka&tanggap terhadap pertentangan-pertentangan internal dalam negeri yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan&ketertiban, yang bisa saja kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing utk tujuan-tujuan yang mengancam kedaulatan NKRI



# SOLUSI KONKRIT

## Ranah Implementasi

e. Ketika aparat “lapangan” (TNI&Polri) telah melaksanakan tugasnya, hal ini harus diikuti dengan oleh lembaga penegak hukum lainnya, hakim dan jaksa pun harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai ketentuan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan, baik di darat, laut dan udara, sehingga memiliki dasar hukum yang tepat ketika menjalankan proses hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan



SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH

